



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**TAHUN 2016 - 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.

Rencana Strategis ini merupakan program kegiatan lima tahunan dalam penyelenggaraan Keciaptakaryaan (Perumahan dan Pemukiman) dan Pertanahan Sumatera Barat. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis yang merupakan dokumen dan pedoman dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan tahun 2016 - 2021 dapat dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Dengan adanya rencana strategis ini, diharapkan program dan kegiatan lebih terarah dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur keciaptakaryaan semakin membaik di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian rencana kerja ini dapat memberikan manfaat dalam menunjang pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Padang, 2017

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Provinsi  
Sumatera Barat

**Ir. CHANDRA MUSTIKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No.25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, berkewajiban untuk menyiapkan

Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Pembangunan Keciaptakaryaan (Perumahan Pemukiman) dan Pertanahan. Tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan dibidang Perumahan, Pemukiman (prasarana dan sarana keciaptakaryaan) baik di perkotaan maupun di perdesaan kedepan akan semakin rumit, oleh karena itu maka untuk menjawab dan menghadapi tantangan ke depan perlu di susun sebuah Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam mewujudkan arah kebijakan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan. Pembangunan Infrastruktur keciaptakaryaan (Perumahan Pemukiman) baik di perkotaan maupun perdesaan adalah menjadi sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat mencakup prasarana gedung, rumah sehat sederhana, prasarana dan sarana permukiman, jalan lingkungan, air bersih, sanitasi dan persampahan serta penataan kawasan permukiman.

Sejalan dengan perkembangan zaman maka kawasan-kawasan permukiman dapat diperkirakan akan tumbuh dan berkembang secara tidak terencana dengan baik, dan akan terlihat dari segi penataan bangunan, penempatan jalan dan fasilitas umum lainnya yang cenderung memanfaatkan tanah kosong tanpa mempertimbangkan aksesibilitas dan manfaatnya, ditambah kondisi sanitasi dengan utilitas yang buruk sehingga mencerminkan tata kehidupan yang kurang sehat dalam suatu kawasan permukiman.

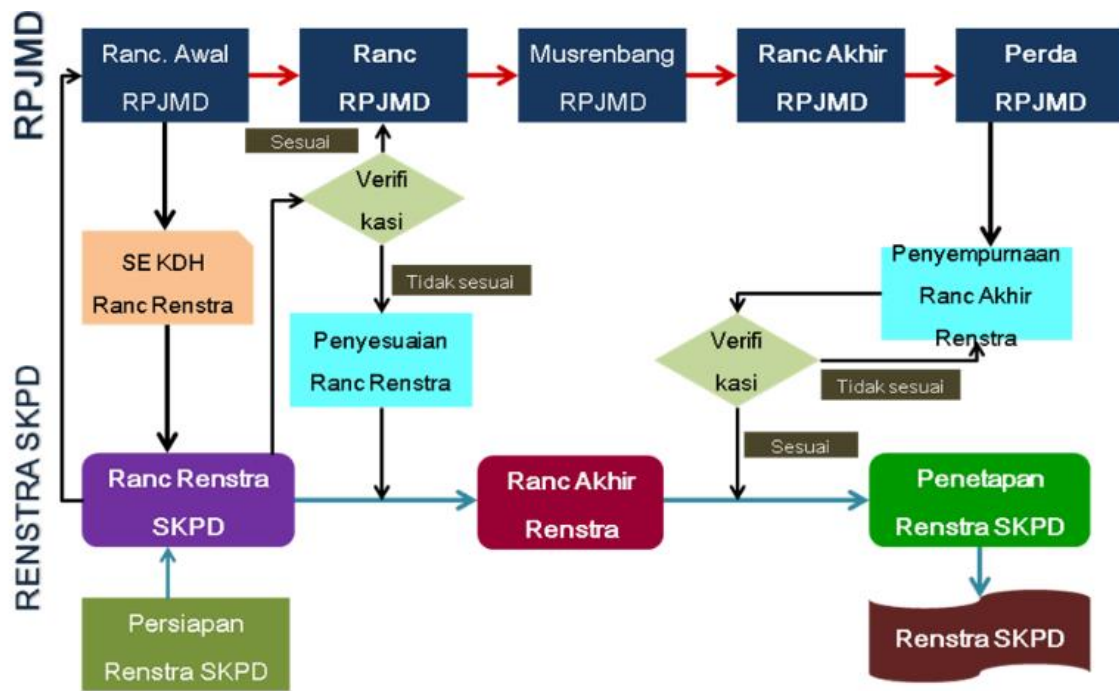
Untuk mempercepat tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dirasa perlu didukung oleh sumber daya yang memadai yang meliputi dana yang cukup, sumber daya manusia yang handal dan peralatan dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai dengan menetapkan skala prioritas penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Kondisi tersebut di atas menjadi tugas utama dan tantangan bagi Dinas Perumahan Rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan melalui penetapan Rencana Strategis OPD.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 –2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Secara rinci penyusunan dokumen Renstra dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari:

1. Pengolahan data dan informasi
  - a. Data dan informasi gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD); mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan OPD; (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya; (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam lingkup kewenangan OPD.
  - b. Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan OPD: mencakup (1) data pendapatan OPD; dan (2) data belanja OPD.
2. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri dari:
  - a. Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD;
  - b. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD.

3. *Review* Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) yang mencakup:
  - a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPera);
  - b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
  - a. Tujuan dan sasaran RTRW;
  - b. Struktur dan pola ruang;
  - c. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi OPD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
  - a. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD (potensi dan permasalahan pelayanan OPD);
  - b. Hasil review Renstra K/L;
  - c. Hasil penelaahan RTRW;
  - d. Hasil analisis dokumen KLHS;
  - e. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD;
7. Perumusan visi dan misi OPD;
8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD; dan
9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD.

Adapun keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016 - 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar 1.1



**Gambar 1. 1**

**Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD  
berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010**

**1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
5. Undang-Undang No. 26/ 2007 tentang Tata Ruang;
6. Undang-Undang No. 18/ 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang No. 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang No. 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang-Undang No. 20/ 2011 tentang Rumah Susun;
10. Undang-Undang No. 2/ 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Undang-Undang No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

12. PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah;
14. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. PP No. 36/ 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Bangunan Gedung;
16. PP No. 39/2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
19. PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. PP No. 26/ 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. PP No. 88/2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 148/2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
23. Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
24. Instruksi Presiden No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13/2006;
27. Permendagri No. 54/2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



28. Permen PU No. 02/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015-2019;
29. Permen PUPR No. 38 tahun 2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;
30. Permen PUPR No. 26/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
31. Permen PUPR No. 13/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
32. Permen PUPR No. 32/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
33. Peraturan Kepala BPN No. 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
34. Perda No. 6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
35. Perda No. 6/2011 tentang Bangunan Gedung;
36. Perda No. 13/2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
37. Perda No. 7/2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035;
38. Perda No. 8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
39. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan UPTD TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat;
40. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan Perumahan Pemukiman dan

Pertanahan dengan sasaran mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Barat serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan antar wilayah guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk meningkatkan profesionalisme, produktifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan infrastruktur Perumahan Permukiman perkotaan dan perdesaan serta Pertanahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

### **1.3.2 Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021, adalah:

1. Tersusunya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016-2021;
2. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera barat selama periode tahun 2016-2021;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (rencana kerja tahunan) Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam periode lima tahun ke depan;
4. Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi

## **1.4 Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

#### 1.2 Landasan Hukum

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur

3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

3.3 Telaah RTRW dan KLHS

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi OPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

#### **2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, urusan wajib pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan meliputi :

##### **1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas.

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan.

##### **2.1.2 Fungsi**

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
5. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan di UPTD TPA Sampah Regional.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibantu oleh Sekretariat, 3 (tiga) Bidang dan 1 UPTD dengan masing-masing uraian tugas sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan program. Dengan rincian sebagai berikut :

- Menyelenggarakan koordinasi perencanaan Dinas;
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional; dan
- Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan.

b. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perumahan Rakyat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

- Melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan kepada Kabupaten/ Kota yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;

- Melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan pengendalian perumahan; dan
- Melakukan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh.

#### c. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan Kawasan Permukiman sesuai urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan bidang kawasan permukiman;
- Menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan terkait bidang kawasan permukiman;
- Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terkait kebijakan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan bidang kawasan permukiman; dan
- Penyelenggaraan pelaporan terkait koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang kawasan permukiman.

#### d. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis ruang lingkup Pertanahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pertanahan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan mengenai urusan pengadaan tanah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan

mengenai urusan perencanaan dan penetapan penggunaan tanah lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

- Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan mengenai urusan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. UPTD TPA Sampah Regional

UPTD Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTD TPA Sampah Regional mempunyai fungsi :

- Penyusunan Rencana Pembangunan Teknis Operasional Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;
- Pengkajian dan Analisis Teknis Operasional Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;
- Pengujian dan Persiapan Teknologi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;
- Pelaksanaan kebijakan teknis Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;
- Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dengan bidang Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional;
- Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- Pelaksanaan Pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.

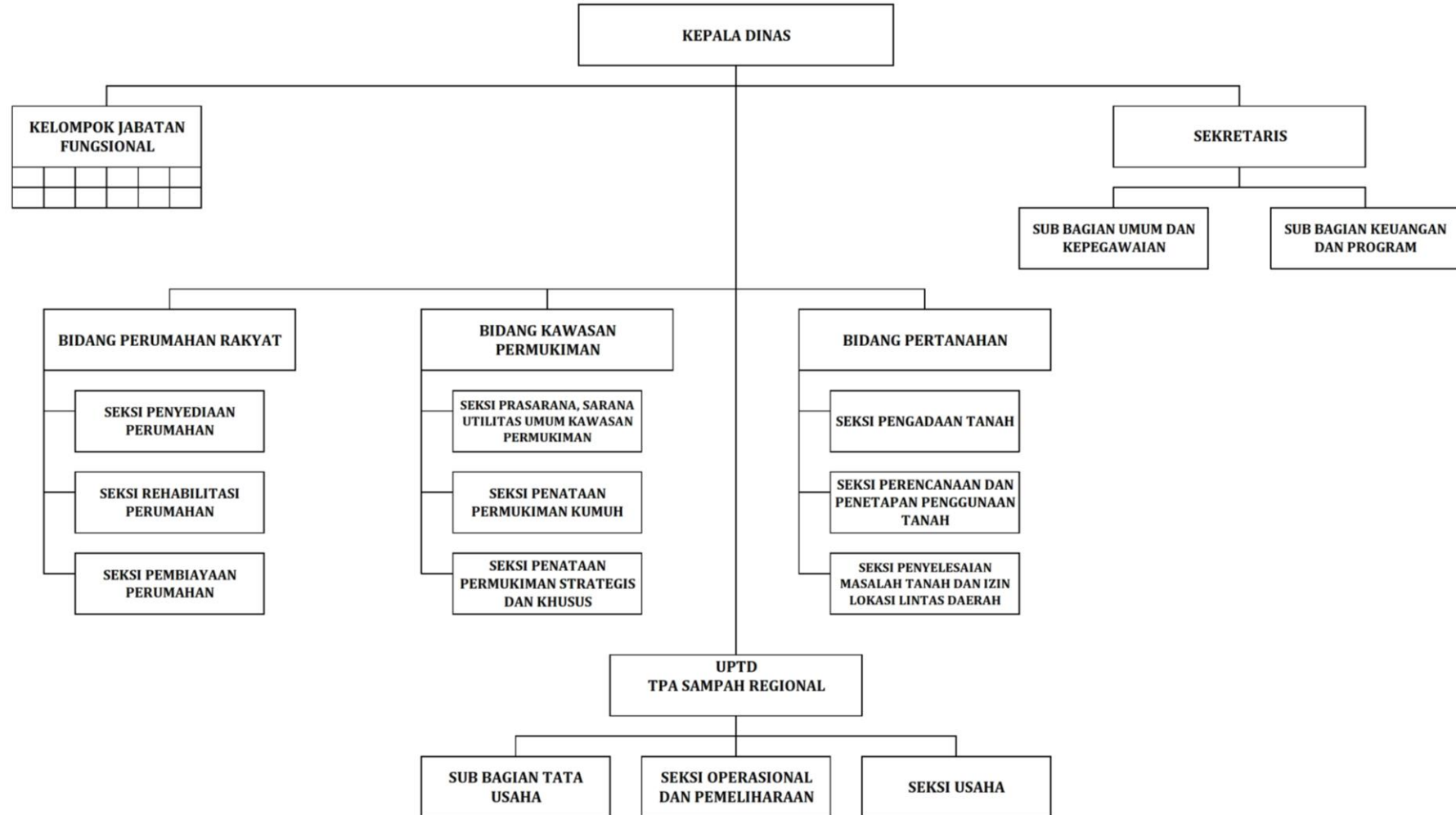
### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tersebut, dibentuk susunan organisasi Dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari:
  - a. Seksi Penyediaan Perumahan;
  - b. Seksi Rehabilitasi Perumahan; dan
  - c. Seksi Pembiayaan Perumahan.
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
  - a. Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
  - b. Seksi Penataan Permukiman Kumuh; dan
  - c. Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus.
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengadaan Tanah;
  - b. Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan
  - c. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah.
6. UPTD TPA Sampah Regional, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan; dan
  - c. Seksi Usaha.
7. Kelompok Jabatan Fungsional



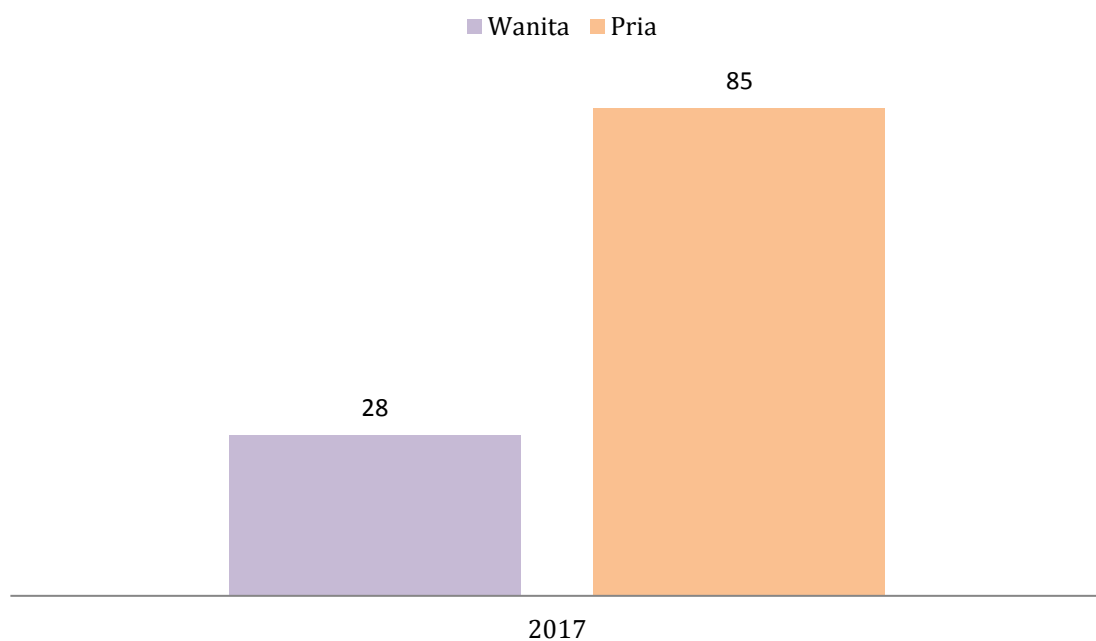
**BAGAN STRUKTUR OPD  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN RAKYAT DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 85 orang yang terdiri dari 83 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan 2 orang Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNSP).



**Gambar 2. 1**  
**Bagan Perbandingan Jumlah Pegawai Pria dan Wanita**

Adapun rincian pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan eselon dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2. 1 Rincian Pegawai**

No.	RINCIAN PEGAWAI	JUMLAH (Orang)
		2017
<b>I.</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>84</b>
1.	Pria	56
2.	Wanita	28
<b>II.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	
1.	Pasca Sarjana ( S-2 )	14
2.	Sarjana	
	S.1 ( Teknis )	14
	S.1 ( Non Teknis )	11
3.	Sarjana Muda	
	D.3 ( Teknis )	2
	D.3 ( Non Teknis )	3
4.	SLTA	38
5.	SLTP	3
6.	SD	-
<b>III</b>	<b>ESELON</b>	
1.	II	1
2.	III	5
3.	IV	14

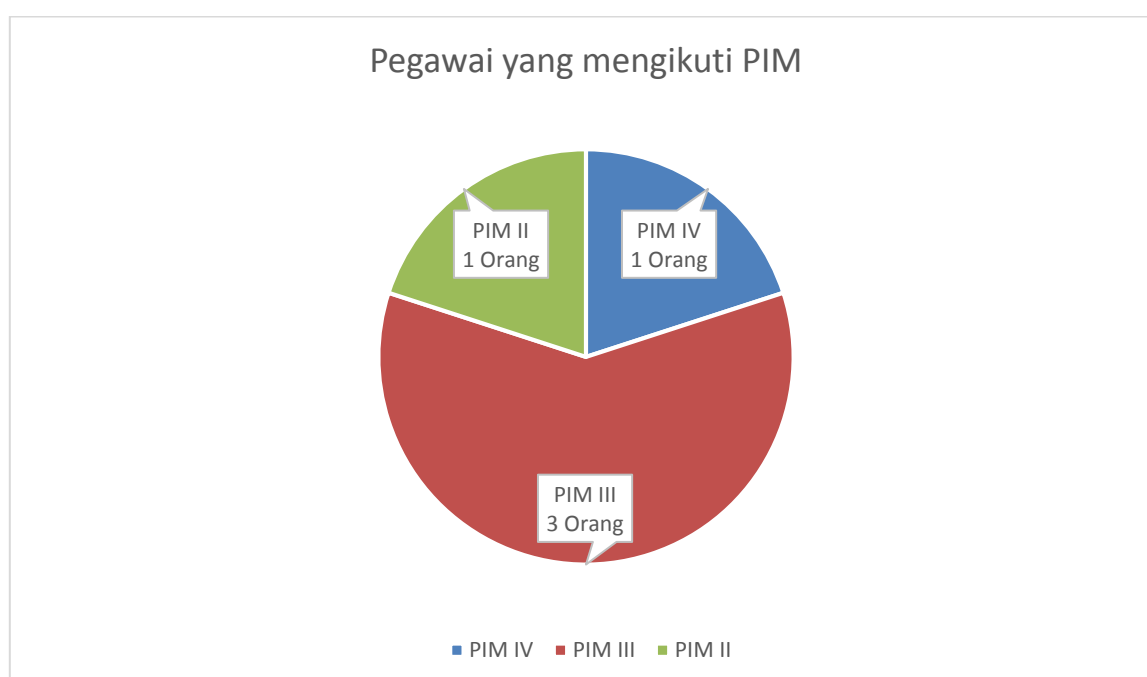
Untuk menunjang pelaksanaan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibutuhkan tenaga profesional yg berkompeten yg memiliki sertifikat keahlian seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 2**  
**Personil yang Memiliki Sertifikat Keahlian Tahun 2017**

No	Jenis Sertifikat Keahlian	Jumlah pegawai (orang)
1.	Pengadaan Barang dan Jasa	22 Orang
2.	Pengelola Teknis Bangunan Gedung / Rumah Negara	4 Orang
3.	Brevet A dan B	6 Orang

No	Jenis Sertifikat Keahlian	Jumlah pegawai (orang)
4.	Arsiparis	4 Orang
5.	Ahli/ Manajemen Kebencanaan	1 Orang
6.	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	1 Orang

Untuk menjadi pejabat struktural diperlukan sertifikat penjenjangan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki sejumlah pegawai yang telah bersertifikat :



**Gambar 2. 2**

**Personil yang Memiliki Sertifikat Penjenjangan Karir 2017**

**2.2.2 Sumber Daya Non-Aparatur**

1) Asset

Sumber Daya Non-Aparatur yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Asset yang berupa sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Peralatan unit UPTD TPA Sampah Regional

No.	Nama Alat	Jumlah
1.	<p>Dump Truck</p> 	3 Unit
2.	<p>Bulldozer</p> 	6 Unit

3.	Excavator	5 Unit
4.	Arm Roll Truck	1 Unit
5.	Belt Conveyor Pemilah Sampah	2 Set



6.	Pick Up Double Cabin 	2 Unit
----	--	--------

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Adapun kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021 mengacu pada pencapaian atas indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut capaian atas indikator tersebut.

- A. Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan  
Sekretariat
  1. Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran
  2. Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur
  3. Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur
  4. Terciptanya Peningkatan SDM Aparatur
  5. Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan
  
- B. Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah  
Bidang Perumahan Rakyat
  1. Terasilinasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi
  2. Terasilinasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
  3. Persentase Rumah Layak Huni
  4. Perkuatan Kelembagaan Bidang Perumahan dan Permukiman
  5. Tersedianya Database perumahan

6. Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah
  7. Jumlah bangunan gedung pemerintah
  8. Jumlah bangunan strategis terbangun
  9. Jumlah rumah negara terbangun
  10. Tempat evakuasi sementara (shelter) terbangun
- C. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah
- Bidang Kawasan Permukiman
1. Peningkatan cakupan layanan air minum
  2. Peningkatan cakupan layanan air limbah
  3. Peningkatan rumah tangga bersanitasi
  4. Penurunan kawasan kumuh
  5. Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi
  6. Panjang Drainase Terbangun
  7. Perda Persampahan
  8. Master Plan Persampahan
  9. Dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/ kab/kota penghasil sampah
  10. Jumlah kelompok masyarakat di kab/kota yang diberikan penyuluhan/ sosialisasi persampahan
  11. Jumlah kelompok masyarakat yang dikutsertakan dalam kegiatan usaha pengolahan sampah di TPA Sampah Regional
- D. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat UPTD TPA Sampah Regional
1. Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional
- E. Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)
- Bidang Pertanahan
1. Tersedianya dokumen perencanaan Penggunaan Tanah dan penetapan penatagunaan tanah
  2. Meningkatnya Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
  3. Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan



Gambaran pencapaian Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2. 3 berikut ini.

**Tabel 2. 3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**  
**Tahun 2011-2015 Provinsi Sumatera Barat**

No	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
17	Pembangunan Rumah Layak Huni	0	0	1795	1180	525	-	-	1.795	1180	525	-	-	1,0	1,0	1,0
18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman (APBN)	16	11	14	11	10	16	11	14	11	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19	Penataan Revitalisasi kawasan tradisional / sejarah, RTH	6	5	2	0	5	6	5	2	0	5	1,0	1,0	1,0		1,0
20	Jumlah Sambungan Rumah Terpasang	5000 0	5000 0	5000 0	6000 0	7572 3	50.000	50.000	50.000	6000 0	75723	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21	Instalasi Pengolahan air limbah (IPAL) skala kota yang di bangun	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1,0	1,0	-		
22	Instalasi Pengolahan air limbah (IPAL) skala kawasan yang di bangun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23	Instalasi Pengolahan air limbah (IPAL) setempat/komunal	4	4	8	-	18	4	4	8	-	18	1,0	1,0	1,0		1,0

No	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	yang di bangun (sanimas, SLBM)															
24	Luasan Daerah Genangan yang ditanggulangi dengan sistem drainase primer	3	2	2	1	0	3	2	2	1	0	1,0	1,0	1,0	1,0	
25	Pembangunan TPA Regional	2	0	0	0	0	2	-	-	0	0	1,0	-	-		
26	Pembangunan TPA Lokal		2	1	3	3		2	1	3	3		1,0	1,0	1,0	1,0
27	Pembangunan sarana pengolahan sampah 3 R	7	9	13	-	3	7	9	13	-	3	1,0	1,0	1,0		1,0

**Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Peningkatan Kerja Pengelolaan Persampahan Dan Drainase	1.294	3.145	5.393	3.896	5.915	5.685	1.049	2.561	4.244	2.933	5.262	4.475	0,8 1	0,8 1	0,7 9	0,7 5	0,89	0,79
Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)						200						50						0,25
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	12.898	1.162	24.759	620			12.221	880	20.250	524			0,9 5	0,7 6	0,8 2	0,8 5		
Pengembangan Perumahan	395	1.065	1.468	1.100	1.659	1.197	359	1.026	1.355	964	1.620	1.011	0,9 1	0,9 6	0,9 2	0,8 8	0,98	0,84
Pemberdayaan Komunitas Perumahan			11.560	14.390	13.609	4.494			11.035	14.177	12.413	4.444			0,9 5	0,9 9	0,91	0,99

Uraian	Rata - rata Pertumbuhan	
	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Kerja Pengelolaan Persampahan Dan Drainase	47%	49%
Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	0%	0%
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	614%	670%
Program Pengembangan Perumahan	41%	44%
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	-16%	-16%

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat**

Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisa SWOT, merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor di dalam (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

### **2.4.1. Analisis Faktor Internal**

Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran Infrastruktur Jalan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan (Weaknesses). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

#### **2.4.1.1. Kekuatan (Strenght)**

- Tersedianya sumber material untuk pekerjaan konstruksi;
- Tersedianya Perda RP3KP Provinsi Sumatera Barat;
- Tersedianya pengelolaan sampah TPA Regional;
- Tersedianya Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

#### **2.4.1.2. Kelemahan (Weakness)**

- Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (*Sistem Sewerage*);
- Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertangani;
- Masih terdapat Backlog rumah;

- Masih banyaknya terdapat Rumah Tidak Layak Huni;
- Terbatasnya lahan untuk pembangunan kawasan perumahan;
- Belum terdapatnya database perumahan;
- Terbatasnya pengembangan Penyediaan prasarana dan sarana utilitas Umum di Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan;
- Belum tersedianya Perda tentang Pengelolaan Sampah Regional;
- Belum tersedianya Perda tentang Retribusi Sampah;
- Belum tersedianya Kelembagaan SPAM Regional;
- Belum tersedianya Kelembagaan Limbah Regional;
- Belum lengkap dan sinkronnya regulasi tentang NSPK Pengelolaan Pertanahan;
- Sumber air baku yang tidak merata di setiap Kabupaten/Kota.

#### **2.4.2. Analisis Faktor Eksternal**

Analisis faktor eksternal terkait penanganan rumah, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk mengidentifikasi peluang-peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut:

##### **2.4.2.1. Peluang (Opportunity)**

- Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan;
- Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
- Adanya teknologi konstruksi yang ramah gempa
- Tersedianya kesempatan tugas belajar untuk meningkatkan pendidikan formal.

##### **2.4.2.2. Ancaman (Threats)**

- Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
- Seringnya bencana alam yang mengancam konstruksi gedung, perumahan dan infrastruktur lainnya.
- Lebih dari 60 % luas wilayah Sumatera Barat merupakan kawasan hutan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
- Masih tinggi jumlah kawasan kumuh.

- Makin meluasnya daerah genangan air.
- kurangnya tenaga ahli dan tenaga terampil yang bersertifikat.
- tingginya produksi sampah diperkotaan.
- Meningkatnya konflik sengketa pertanahan.

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Optimalkan peluang mengikuti pendidikan teknis, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dibidang konstruksi;
2. Mengoptimalkan kinerja pengelola sampah dengan dana yang tersedia dan keterbatasan lahan dengan cara membangun dan mengoperasikan TPA regional guna menangani produksi sampah yang makin meningkat di perkotaan;
3. Mengoptimalkan ketersediaan sumber air baku untuk meningkatkan pelayanan air minum guna memenuhi sambungan rumah (SR) diperkotaan, perdesaan, dan daerah rawan air;
4. Mengoptimalkan pengelolaan air limbah untuk mengatasi meluasnya daerah genangan;
5. Mengoptimalkan peningkatan jumlah renovasi rumah tidak layak huni dan PSU untuk mengurangi kawasan kumuh;
6. Mengoptimalkan bantuan FLPP bagi MBR untuk mengatasi backlog perumahan.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

##### **3.1.1. Perumahan Rakyat**

- Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau
- Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR
- Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand).
- Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
- Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).
- Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (urban area) terkendala dengan proses pengadaan lahan.

##### **3.1.2. Kawasan Permukiman**

- Masih adanya kawasan kumuh.
- Masih belum tersedianya data kawasan permukiman.
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penyediaan air minum.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air minum.
- Terbatasnya pendanaan penyediaan air minum.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang air minum
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam prasarana air limbah.



- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air limbah.
- Terbatasnya pendanaan penyediaan air limbah.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Masalah TPA (99 % *open dumping*) karena keterbatasan Lokasi dapat menyebabkan pencemaran leachate, pencemaran gas/kebakaran dan kecelakaan akibat berkurangnya keselamatan manusia.
- Aturan persampahan mensyaratkan rehabilitasi TPA *open dumping* menjadi *controlled landfill /sanitary landfill* dalam tahun 2012
- Peran operator/regulator yang tidak jelas
- Keterbatasan Dana : Investasi, Organisasi & Manajemen, Tipping Fee rendah
- Perlu kerjasama pengelolaan sampah secara terpadu oleh beberapa pemerintah daerah dalam rangka memecahkan permasalahan penyediaan lahan Pengolahan akhir sampah di kota besar dan metropolitan
- Perlunya pengurangan sampah di sumbernya di mana fasilitasi pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong recourse recovery dan daur ulang sampah
- Pembangunan prasarana dan sarana drainase mempunyai fungsi sebagai saluran pembuang air hujan dan disisi lain sebagai pengatur limpahan air (banjir).
- Sistem drainase makro dan mikro untuk penanggulangan genangan di permukiman harus merupakan subsistem pengendalian banjir regional.
- Pengelolaan siklus air merupakan bagian yang perlu didukung oleh kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase sehingga berfungsi maksimal.
- Tidak tersedianya dana memadai, karena selama ini operasional dan pemeliharaan drainase bukan prioritas utama, karena tidak diketahuinya kebutuhan nyata dana operasional dan penyelenggaraan drainase.
- Belum terintegrasinya penyelenggaraan drainase dengan sektor lainnya sehingga kurang perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.
- Meningkatnya pencemaran lingkungan di saluran drainase.
- Lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana drainase karena tidak jelasnya wewenang pemerintah daerah dalam masalah drainase.
- Tingkat kepedulian komunitas masih rendah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak huni.

- Kurangnya perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.

### **3.1.3. Pertanahan**

- Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan.
- Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.
- Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Barat.

**VISI Gubernur Sumatera Barat yaitu :**

## **TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA**

Sedangkan Misi Gubernur Sumatera Barat yaitu :

1. *Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";*
2. *Meningkatkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;*
3. *Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;*
4. *Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadi Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat;*
5. *Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.*

Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Misi ke 5 **Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.** Seiring dengan harapan tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk mampu mengejawatahkan visi pembangunan sumbar tahun 2016 - 2021 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No. 78 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas.

Sesuai dengan misi 5 tersebut, ada beberapa isu strategis terkait Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana/infrastruktur serta pelayanan transportasi publik
- Melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelestarian lingkungan

**Tabel 3. 1**

**Hubungan Antara Visi, Misi ke 5, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Gubernur dengan Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera
MISI 5 : Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	2. Meningkatnya Prasarana Umum pada kawasan pemukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan,	1. Meningkatkan kawasan permukiman yang asri, bersih dan nyaman melalui pengembangan dan pengelolaan air minum dan sanitasi	1. Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh.
			2. Pengembangan SPAM regional, TPA Regional, Drainase kewenangan provinsi.
			3. Meningkatkan kualitas dan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi

**Tabel 3. 2**

**Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Kebijakan Umum dan Program Prioritas Gubernur dengan Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Tujuan	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Prioritas
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan	1. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh 2. Pembentukan SPAM dan Pengolahan Limbah Regional, Pengembangan TPA Regional, dan Drainase kewenangan Provinsi	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin

Tujuan	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Prioritas
			Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset 7. Pengembangan Perumahan 8. Pemberdayaan Komunitas Perumahan 9. Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan 10. Pengelolaan Pertanahan

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan nusantara: antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, antara kota Jakarta dan kota-kota lainnya.

Fenomena yang terkait adalah urbanisasi yang cukup tinggi. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi ini belum disertai oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut maupun backlog yang telah ada sebelumnya. Demikian juga ketersediaan infrastruktur belum merata ke semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

### **3.3.1. Infastruktur Permukiman**

1. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
2. pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana (bisa merupakan dampak tidak langsung dari desentralisasi)
3. Kerusakan lingkungan hidup
4. Perubahan Iklim dan bencana alam
5. Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial

## **3.4 Telaahan RTRW Provinsi dan KLHS**

### **2.4.1. Pengembangan Prasarana Wilayah dengan Dukungan Infrastuktur.**

Keterpaduan pola ruang Provinsi Sumatera Barat melalui Pengembangan potensi Sumber daya alam dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan Provinsi Sumatera Barat
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan
5. Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan, dan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro,

dan Tuapejat untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan

6. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah
7. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan
8. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah

Pola Tata Ruang membagi seluruh aktifitas kehidupan ke dalam sebuah bentuk yang saling ketergantungan. Jaringan jalan mempunyai peran ganda dalam pola struktur Tata Ruang yaitu sebagai prasarana pergerakan barang dan penumpang juga sebagai pemersatu seluruh aktivitas.

Kawasan permukiman memerlukan jaringan jalan untuk mobilitas penghuninya begitu pula kawasan pertanian, perkebunan, perindustrian dan lain – lain aktivitas produksi.

Keberadaan Bukit Barisan yang membelah Provinsi Sumatera Barat menjadi bagian Barat dan Timur dengan kawasan hutan yang menguasai lebih kurang 64 % wilayah Sumatera Barat, menjadi kendala utama dalam pengembangan wilayah.

Secara umum letak Kabupaten/Kota di bagi atas daerah Pesisir Pantai seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagian wilayah Kabupaten Agam, serta Kabupaten Kota yang pada lereng Bukit Barisan seperti Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman dan satu Kabupaten lepas pantai yaitu Kabupaten Mentawai.



Berada dalam patahan semangko ± 600 Km garis pantai menjadikan Provinsi ini menjadi rawan gempa dan rawan Tsunami, keterbatasan pemanfaatan ruang untuk aktifitas ekonomi karena hanya ± 36% luas wilayah yang dapat dibudi dayakan, sehingga diperlukan analisa daya dukung dan daya tampung untuk mendapatkan pola ruang yang efektif dan efisien.

#### 2.4.2. Skema Hubungan Antara Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang lain.

Hubungan antara Kabupaten Kota dibentuk dengan system jaringan jalan antara Provinsi (Jalan Nasional) dan antara Kabupaten/Kota (Jalan Provinsi) serta di lingkungan Kabupaten/Kota itu sendiri (Jalan Kabupaten/Kota) Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi telah terhubung dengan 18 Ibu Kota Kabupaten/Kota.



Gambar 3. 1 Peta Gagasan Pembentukan Struktur Ruang

Pembentukan Struktur Ruang didasari atas pola jaringan jalan yang telah ada, maka untuk pengembangan prasarana wilayah perlu dibangun/ditingkatkan dan beberapa ruas jalan antara lain :

1. Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya: Ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang-Kiliran Jao.
2. Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Batas Riau: Ruas Jalan Batas Riau-Panti-Simpang Empat-Air Balam-Teluk Tapang.
3. Peningkatan Daya Dukung Jalan dari Kabupaten Solok menuju Kabupaten Solok Selatan dan Perbatasan Provinsi Jambi: Ruas Jalan Lubuk Selasih-Padang Aro-Sungai Penuh.
4. Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya : Ruas Jalan Padang Aro-Lubuk Malako-Pulau Punjung.
5. Perkuatan sistem jaringan jalan Kota Padang-Pariaman-Tiku-Sasak-Bunga Tanjung.
6. Peningkatan Jalan Padang Sawah-Kumpulan
7. Penambahan kapasitas jaringan jalan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi: Ruas Padang By Pass-Buayan-Sicincin-Koto Mambang-Balingka-Ngarai Sianok-Jembatan Ngarai Sianok-Bukittinggi By Pass.
8. Penambahan Kapasitas Jalan Balingka-Matur-Palembayan-Padang Koto Gadang Kabupaten Agam.
9. Peningkatan kapasitas jalan mendukung pola pengembangan perdagangan dan pertanian, dan perkebunan : Ruas Bukittinggi-Payakumbuh-Batas Riau termasuk penyelesaian Jembatan Kelok 9.
10. Pembangunan Jalan antara Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan : Ruas Jalan Teluk Kabung-Mandeh-Tarusan.

### **2.4.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Prasarana lingkungan ini digunakan antar wilayah melalui berbagai mekanisme kerjasama. Pengembangan sistem prasarana lingkungan ini sebagai upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu di kembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kabupaten/kota dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

Prasarana lingkungan terdiri atas :

- a. Tempat Pengolahan akhir (TPA) terpadu Regional
- b. Tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri B3 dan non B3.
- c. Sistem drainase
- d. Sistem pengelolaan air minum (SPAM)
- e. Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat

Lokasi pengembangan TPA terpadu harus didasari oleh kesepakatan dan kerjasama antar wilayah, dan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang persampahan.

Sistem prasarana lingkungan sebagaimana yang dimaksud di atas ditetapkan dengan kriteria mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Pada bagian ini akan dijelaskan isu-isu strategis kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, dimulai dari Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **3.5.1 Isu Strategis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

#### **Isu-Isu Strategis Perumahan Rakyat**

- Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau

- Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR
- Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand).
- Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
- Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).
- Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (urban area) terkendala dengan proses pengadaan lahan.

### **Isu-Isu Strategis Kawasan Permukiman**

- Masih adanya kawasan kumuh.
- Masih belum tersedianya data kawasan permukiman.
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penyediaan air minum.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air minum.
- Terbatasnya pendanaan penyediaan air minum.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang air minum
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam prasarana air limbah.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air limbah.
- Terbatasnya pendanaan penyediaan air limbah.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Masalah TPA (99 % *open dumping*) karena keterbatasan Lokasi dapat menyebabkan pencemaran leachate, pencemaran gas/kebakaran dan kecelakaan akibat berkurangnya keselamatan manusia.
- Aturan persampahan mensyaratkan rehabilitasi TPA *open dumping* menjadi *controlled landfill /sanitary landfill* dalam tahun 2012
- Peran operator/regulator yang tidak jelas
- Keterbatasan Dana : Investasi, Organisasi & Manajemen, Tipping Fee rendah

- Perlu kerjasama pengelolaan sampah secara terpadu oleh beberapa pemerintah daerah dalam rangka memecahkan permasalahan penyediaan lahan Pengolahan akhir sampah di kota besar dan metropolitan
- Perlunya pengurangan sampah di sumbernya di mana fasilitasi pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong resource recovery dan daur ulang sampah
- Pembangunan prasarana dan sarana drainase mempunyai fungsi sebagai saluran pembuang air hujan dan disisi lain sebagai pengatur limpahan air (banjir).
- Sistem drainase makro dan mikro untuk penanggulangan genangan di permukiman harus merupakan subsistem pengendalian banjir regional.
- Pengelolaan siklus air merupakan bagian yang perlu didukung oleh kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase sehingga berfungsi maksimal.
- Tidak tersedianya dana memadai, karena selama ini operasional dan pemeliharaan drainase bukan prioritas utama, karena tidak diketahuinya kebutuhan nyata dana operasional dan penyelenggaraan drainase.
- Belum terintegrasinya penyelenggaraan drainase dengan sektor lainnya sehingga kurang perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.
- Meningkatnya pencemaran lingkungan di saluran drainase.
- Lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana drainase karena tidak jelasnya wewenang pemerintah daerah dalam masalah drainase.
- Tingkat kepedulian komunitas masih rendah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak huni.
- Kurangnya perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.

### **Isu-Isu Strategis Pertanian**

- Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanian.
- Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Visi - Misi**

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, untuk menjalankan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Barat , yaitu :

***“Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan”***

Permukiman yang **layak huni dan berkelanjutan** dapat diterjemahkan melalui permukiman dengan cakupan pelayanan air bersih yang baik, penurunan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri.

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Mempercepat pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, layak huni, baik diperkotaan maupun dipedesaan;
3. Meningkatkan penataan bangunan yang aman, nyaman, serasi dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

5. Mewujudkan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan; dan
6. Meningkatkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan.

## **4.2 Tujuan dan Sasaran**

### **4.2.1. Tujuan**

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan;
- b) Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- c) Menyelenggarakan dan memfasilitasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan;
- d) Menyelenggarakan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
- e) Menyelenggarakan penyediaan air minum dan sanitasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- f) Menyelenggarakan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan; dan
- g) Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan).

### **4.2.2. Sasaran**

- a) Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi;
- b) Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- c) Meningkatnya penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara
- d) Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan;

- e) Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman;
- f) Berkurangnya daerah genangan pada kawasan permukiman;
- g) Tersedianya produk legal formal TPA Sampah Regional;
- h) Meningkatnya peran serta masyarakat di kawasan TPA Sampah Regional
- i) Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional
- j) Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah
- k) Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- l) Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan Penetapan Tanah Ulayat



**Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase tingkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD						
		Nilai LAKIP OPD (minimal BB)	BB	BB	B	B	AA	AA
		Persentase tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	1	1	1	1	1	1
		Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tingkat pengelolaan keuangan daerah pada	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			unit OPD						
2	Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Terfasilitasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	0%	0%	25%	25%	25%	100%
			Terfasilitasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	0%	0%	25%	25%	25%	100%
			Persentase Rumah Layak Huni		15%	20%	25%	30%	100%
			Perkuatan Kelembagaan Bidang Perumahan dan Permukiman		15%	20%	25%	30%	100%
			Tersedianya Database perumahan	11%	16%	21%	26%	26%	100%

		Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah	0%	0%	25%	25%	25%	100%
Meningkatnya penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara	Jumlah bangunan gedung pemerintah							
	Jumlah bangunan strategis terbangun							
	Jumlah rumah negara terbangun							
	Tempat evakuasi sementara (shelter) terbangun							

3	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan	Peningkatan cakupan layanan air minum	69%	70%	72%	75%	80%	85%
			Peningkatan cakupan layanan air limbah	56%	57%	58%	59%	60%	61%
			Peningkatan rumah tangga bersantiasi	63%	64%	65%	66%	67%	68%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Penurunan kawasan kumuh	16,50%	15,50%	14,50%	13,50%	12,50%	11,50%
			Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi		30,00%	30,01%	30,02%	30,03%	30,04%
		Berkurangnya daerah genangan pada kawasan permukiman	Panjang Drainase Terbangun	2,5 km	3,2 km	3,9 km	4,6 km	5,3 km	6,0 km

	Tersedianya produk legal formal TPA Sampah Regional	Perda Persampahan			1 Dokumen draft Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan	1 Dokumen Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan		
		Master Plan Persampahan			1 Dokumen Masterplan Persampahan	-		
		Dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/ kab/kota penghasil sampah			1 Dokumen (1 Kecamatan)	1 Dokumen (1 Kecamatan)	1 Dokumen (1 Kecamatan)	1 Dokumen (1 Kecamatan)
	Meningkatnya peran serta masyarakat di kawasan TPA Sampah Regional	Jumlah kelompok masyarakat di kab/kota yang diberikan penyuluhan/ sosialisasi persampahan			4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari
	Jumlah kelompok masyarakat yang dikutsertakan			5 Kelompok	6 Kelompok	7 Kelompok	8 Kelompok	

			dalam kegiatan usaha pengolahan sampah di TPA Sampah Regional						
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional	Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit
5	Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah	Tersedianya dokumen perencanaan Penggunaan Tanah dan penetapan penatagunaan tanah	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
		Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Meningkatnya Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	79%	80,5%	82%	83,5%	85%	85%
		Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan	Meningkatnya persentase fasilitasi	80%	85%	85%	87,5%	90%	90%

		Penetapan Tanah Ulayat	penyelesaian masalah pertanahan						
--	--	------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--



### **4.3 Strategi Dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut.

#### **Sasaran 1: Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi**

Strategi : Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN.

Kebijakan :

1. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat.
2. Meningkatkan pendidikan formal ASN.

#### **Sasaran 2: Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan**

Strategi :

1. Menciptakan iklim yang kondusif serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan.
2. Meningkatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP.

Kebijakan :

1. Menyusun database perumahan.
2. Menyusun NSPK pembiayaan perumahan.
3. Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan.
4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan.

#### **Sasaran 3: Meningkatnya penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara**

Strategi :

1. Meningkatkan penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara

Kebijakan :

1. Jumlah bangunan gedung pemerintah
2. Jumlah bangunan strategis terbangun

3. Jumlah rumah negara terbangun
4. Tempat evakuasi sementara (shelter) terbangun.

#### **Sasaran 4; Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan**

Strategi :

Menyediakan ketersediaan sarana, prasarana air minum dan sanitasi yang diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kota sedang-kecil, kawasan kumuh perkotaan, nelayan, dan perdesaan.

Kebijakan :

1. Membangun unit produksi SPAM Regional untuk pengembangan jaringan distribusi bagi perluasan pelayanan.
2. Mempercepat peningkatan cakupan layanan melalui pemanfaatan dana DAK.
3. Memberikan bantuan teknis penyusunan FS dan spesifikasi teknis.
4. Membangun SPAM yang diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis Provinsi.
5. Membangun sistem pengolahan air limbah diarahkan dari paradigma lama "TARGET ORIENTED" ke paradigma baru "PUBLIC NEEDS ORIENTED" dimana :
  - Masyarakat berperan langsung sebagai komponen pembangunan
  - Sistem sanitasi menjadi berkelanjutan
6. Pelaksanaan sanitas berbasis masyarakat (SANIMAS).
7. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah terpusat (*sewerage system*) kriteria lokasi:
  - Kota besar/metro yang telah mempunyai sistem *sewerage*.
  - Mempunyai rencana yang jelas (pjm dan memorandum proyek/ program).

#### **Sasaran 5; Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman**

Strategi :

1. Mengurangi luasan kawasan kumuh.
2. Meningkatkan kualitas PSU permukiman.

Kebijakan :

1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman.
3. Menyusun SPM kawasan permukiman.
4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman.

### **Sasaran 6: Berkurangnya daerah genangan pada kawasan permukiman**

Strategi :

Membangun drainase.

Kebijakan :

Panjang drainase terbangun

### **Sasaran 7: Tersedianya produk legal formal TPA Sampah Regional**

Strategi :

Menyiapkan legal formal TPA Sampah Regional

Kebijakan :

1. Menyusun Perda Persampahan
2. Menyusun Master Plan Persampahan
3. menyusun dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/ kab/kota penghasil sampah

### **Sasaran 8: Meningkatnya peran serta masyarakat di kawasan TPA Sampah Regional**

Strategi :

Mendorong masyarakat untuk aktif dalam pengelolaan sampah

Kebijakan :

1. Memberdayakan kelompok masyarakat di kab/kota yang dalam penyuluhan/ sosialisasi persampahan
2. Memberdayakan kelompok masyarakat dalam kegiatan usaha pengolahan sampah di TPA Sampah Regional

### **Sasaran 9; Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional**

Strategi :

Menyediakan Sarana, Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional.

Kebijakan :

1. Melaksanakan Pengelolaan TPA Sampah Regional.
2. Menyiapkan Regulasi tentang Pengelolaan dan Retribusi Jasa Pemrosesan Sampah.

### **Sasaran 10; Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah**

Strategi :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah.
2. Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang inklusif, seimbang dan terpadu.

Kebijakan :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah.
2. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Penatagunaan Tanah.
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Penggunaan Tanah.

### **Sasaran 11; Terwujudnya Tertib Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum**

Strategi :

1. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para *stakeholders* tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kebijakan :

1. Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
2. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

**Sasaran 12; Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan**

Strategi :

1. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan
2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarsasi masalah pertanahan.

Kebijakan :

1. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan
2. Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat
3. Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi
4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah Pertanahan.

**Tabel 4. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD 2016-2021**

<b>Visi</b>	Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan
<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan;</li> <li>2. Mempercepat pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, layak huni, baik dipertanian maupun dipedesaan;</li> <li>3. Meningkatkan penataan bangunan yang aman, nyaman, serasi dan berwawasan lingkungan;</li> <li>4. Meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;</li> <li>5. Mewujudkan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan; dan</li> <li>6. Meningkatkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan.</li> </ol>

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi	Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat.</li> <li>2. Meningkatkan pendidikan formal ASN.</li> </ol>
Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan iklim yang kondusif serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan.</li> <li>2. Meningkatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun database perumahan.</li> <li>2. Menyusun NSPK pembiayaan perumahan.</li> <li>3. Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan.</li> <li>4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan.</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara	Meningkatkan penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah bangunan gedung pemerintah</li> <li>2. Jumlah bangunan strategis terbangun</li> <li>3. Jumlah rumah negara terbangun</li> <li>4. Tempat evakuasi sementara (shelter) terbangun.</li> </ol>
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan	Menyediakan ketersediaan sarana, prasarana air minum dan sanitasi yang diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kota sedang-kecil, kawasan kumuh perkotaan, nelayan, dan perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun unit produksi SPAM Regional untuk pengembangan jaringan distribusi bagi perluasan pelayanan.</li> <li>2. Mempercepat peningkatan cakupan layanan melalui pemanfaatan dana DAK.</li> <li>3. Memberikan bantuan teknis penyusunan FS dan spesifikasi teknis.</li> <li>4. Membangun SPAM yang diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis Provinsi.</li> <li>5. Membangun sistem pengolahan air limbah diarahkan dari paradigma lama "TARGET ORIENTED" ke paradigma baru "PUBLIC NEEDS ORIENTED" dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat berperan langsung sebagai komponen pembangunan</li> <li>- Sistem sanitasi menjadi berkelanjutan</li> </ul> </li> <li>6. Pelaksanaan sanitas berbasis masyarakat (SANIMAS).</li> <li>7. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah terpusat (<i>sewerage system</i>) kriteria lokasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota besar/metro yang telah mempunyai sistem <i>sewerage</i>.</li> <li>- Mempunyai rencana yang jelas (pjm dan memorandum proyek/ program).</li> </ul> </li> </ol>
	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi luasan kawasan kumuh.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas PSU permukiman</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman.</li> <li>3. Menyusun SPM kawasan permukiman.</li> </ol> <p>Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Berkurangnya daerah genangan pada kawasan permukiman	Membangun drainase	Panjang drainase terbangun
	Tersedianya produk legal formal TPA Sampah Regional	Menyiapkan legal formal TPA Sampah Regional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Perda Persampahan</li> <li>2. Menyusun Master Plan Persampahan</li> <li>3. menyusun dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/ kab/kota penghasil sampah</li> </ol>
	Meningkatnya peran serta masyarakat di kawasan TPA Sampah Regional	Mendorong masyarakat untuk aktif dalam pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberdayakan kelompok masyarakat di kab/kota yang dalam penyuluhan/ sosialisasi persampahan</li> <li>2. Memberdayakan kelompok masyarakat dalam kegiatan usaha pengolahan sampah di TPA Sampah Regional</li> </ol>
Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional	Menyediakan Sarana, Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pengelolaan TPA Sampah Regional.</li> <li>2. Menyiapkan Regulasi tentang Pengelolaan dan Retribusi Jasa Pemrosesan Sampah.</li> </ol>
Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah.</li> <li>2. Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang inklusif, seimbang dan terpadu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah.</li> <li>2. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Penatagunaan Tanah.</li> <li>3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Penggunaan Tanah.</li> </ol>
	Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para <i>stakeholders</i> tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.</li> <li>2. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.</li> <li>3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.</li> </ol>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan Penetapan Tanah Ulayat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarsasi masalah pertanahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan</li> <li>2. Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat</li> <li>3. Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi</li> <li>4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah Pertanahan.</li> </ol>

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dengan mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian renstra 2016 - 2021 dilandasi dengan Indikator Kinerja maka dilakukan penyusunan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Pendanaan sebagai berikut:

#### **5.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Secara garis besar Program dan Kegiatan yang disusun terdiri dari :

- a. Melanjutkan Kegiatan-Kegiatan yang belum selesai pada RPJMD tahun 2010 - 2015
- b. Menyusun Program dan Kegiatan baru RPJMD tahun 2016 - 2021

Program-program tersebut meliputi:

1. APBD
2. APBN

Uraian sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM DINAS MELALUI DANA APBD**

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :**
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor
  - Penyediaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  - Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :**
  - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan perlengkapan kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
  - Pengadaan Meubelier
  
- **Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :**
  - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  
- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :**
  - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
  
- **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :**
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
  - Penatausahaan Keuangan OPD
  
- **Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset**
  - Penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD
  - Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD
  - Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD
  
- **Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :**
  - Fasilitasi Pelaksanaan Penyediaan Perumahan di Sumatera Barat
  - Fasilitasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan di Sumatera Barat
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan

- Fasilitasi Perda Dokumen Penyediaan perumahan Kabupaten Kota
- Penyusunan NSPK Pengembangan Perumahan
- Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan
- Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
- Sosialisasi Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam
- Workshop Rumah Aman Bencana
- Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang/Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah
- Fasilitasi Penyediaan dan Reabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi
- Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Yang Terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi
  
- **Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan :**
  - Pembuatan SPAM Regional
  - Pembuatan IPLT Regional
  - Koordinasi dan Evaluasi Program Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat
  - Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi
  - Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
  - Penyusunan SPM Kawasan Permukiman
  - Fasilitasi dan Sosialisasi Program Kawasan Permukiman
  - Pendataan Kawasan Permukiman di Sumatera Barat
  - Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)
  - Stimulasi Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus
  - Pembuatan Drainase lintas Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Perda Persampahan Provinsi Sumatera Barat
  - Penyusunan Master Plan Persampahan Provinsi Sumatera Barat

- Penyusunan dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/kab/kota penghasil sampah
- Sosialisasi persampahan terhadap Kelompok Masyarakat
- Pengelolaan Sampah 3 R Berbasis Masyarakat
  
- **Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**
  - Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional
  - Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional
  - Pemantauan lingkungan kawasan TPA Sampah Regional
  
- **Program Pengelolaan Pertanahan**
  - Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah
  - Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
  - Bimtek Perencanaan Penatagunaan Tanah
  - Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
  - Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
  - Bimtek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
  - Inventarisasi dan Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat
  - Sosialisasi Pengaturan dan Penetapan tanah Ulayat
  - Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat
  - Inventarisasi dan Penyelesaian Masalah Pemanfaatan Tanah Kosong, Redistribusi Tanah, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
  - Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi
  - Bimtek Penanganan Masalah Pertanahan

## **2. PROGRAM DINAS MELALUI DANA APBN**

- SNVT Penyediaan Perumahan.

### **5.2 Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah gambaran hasil-hasil utama yang mengacu kepada manfaat (*outcome*) dari hasil sasaran kegiatan.

1. Persentase pelayanan administrasi Perkantoran  
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran
2. Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur  
Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur
3. Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas  
Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Persentase rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat  
Terciptanya Peningkatan SDM Aparatur
5. Persentase tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD  
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD (LAKIP, LKPJ dan LPPD)
6. Persentase tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan  
Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan
7. Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD  
Kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD
8. Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD  
Kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD

9. Persentase tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit OPD  
Terlaksananya Kelancaran Penatausahaan Keuangan OPD
10. Terfasilitasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi  
Terlaksananya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi
11. Terfasilitasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi  
Terlaksananya fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi
12. Persentase Rumah Layak Huni  
Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di 19 Kabupaten/Kota
13. Perkuatan Kelembagaan Bidang Perumahan dan Permukiman  
Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pembinaan kepada POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
14. Tersedianya Database perumahan  
Tersusunnya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah  
Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi kepada Orang/Badan Usaha Yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan di Bidang Perumahan
16. Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah  
Dengan kondisi awal Tahun 2015 jumlah gedung negara terbangun adalah 12 unit, maka pada Tahun 2016-2021 ditargetkan diselesaikannya 22 gedung negara lagi sehingga total rumah negara terbangun pada akhir 2021 adalah 34 unit.

17. Jumlah Bangunan Strategis Terbangun

Sepanjang tahun 2016-2021 ditargetkan selesainya pembangunan 4 bangunan strategis, yaitu Gedung Utama Kantor Gubernur, Gedung Kebudayaan, Main Stadium dan Convention Centre.

18. Jumlah Rumah Negara Terbangun

Dengan kondisi awal Tahun 2015 jumlah rumah negara terbangun adalah 6 unit, maka pada Tahun 2016-2021 ditargetkan diselesaikannya 6 rumah negara lagi sehingga total rumah negara terbangun pada akhir 2021 adalah 12 unit.

19. Tempat Evakuasi Sementara (Shelter) terbangun

Dengan kondisi awal (Tahun 2015) telah terbangunnya 4 shelter maka pada sepanjang tahun Renstra (2016-2021) ditargetkan terbangun 6 shelter, sehingga total shelter terbangun menjadi 10 unit.

20. Peningkatan cakupan layanan air minum

Target pada tahun 2021 adalah 85% penduduk terlayani air bersih.

21. Peningkatan cakupan layanan air limbah

Target pada tahun 2021 adalah 61% penduduk terlayani air bersih.

22. Peningkatan rumah tangga bersanitasi

Peningkatan rumah tangga bersanitasi menjadi 77%.

23. Penurunan kawasan kumuh

Adapun indikator tercapainya penurunan kawasan kumuh secara kuantitatif adalah penurunan persentase kawasan dari 17,5% pada tahun 2015 menjadi 11,5% pada akhir 2021.

24. Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi

Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi menjadi 30,04% pada Tahun 2021



25. Panjang Drainase Terbangun

Adapun indikator dari pembangunan drainase adalah terbangunnya drainase sepanjang 35 km selama kurun waktu Tahun 2016 – 2021, sehingga panjang drainase awal yaitu 25 km bertambah menjadi 60 km pada akhir tahun 2021.

26. Perda Persampahan

Tersusunnya Dokumen Perda Persampahan.

27. Masterplan Persampahan

Tersusunnya Dokumen Masterplan Persampahan.

28. Dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/ kab/kota penghasil sampah

Tersusunnya Dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/ kab/kota penghasil sampah.

29. Jumlah kelompok masyarakat di kab/kota yang diberikan penyuluhan/ sosialisasi persampahan

Pemberdayaan kelompok masyarakat di kab/kota yang diberikan penyuluhan/ sosialisasi persampahan

30. Jumlah kelompok masyarakat yang dikutsertakan dalam kegiatan usaha pengolahan sampah di TPA Sampah Regional

Pemberdayaan kelompok masyarakat yang dikutsertakan dalam kegiatan usaha pengolahan sampah di TPA Sampah Regional

31. Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional

Meningkatnya pelayanan persampahan di TPA Sampah Regional dari 2 TPA dikondisi awal, menjadi 4 TPA pada akhir tahun 2021.

32. Tingkat akurasi, kecermatan dan kesesuaian perencanaan dan penetapan penggunaan tanah

Tersedianya dokumen perencanaan Penggunaan Tanah dan penetapan penatagunaan tanah

33. Ketersedian informasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Meningkatnya Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

34. Persentase masalah tanah yang difasilitasi

Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

## **Pendanaan Indikatif**

Dalam proses penyusunan program, kegiatan, lokasi dan pendanaan indikatif yang termuat dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5.1) disusun berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Tahun 2010 – 2015, proyeksi kebutuhan dan target yang akan dicapai, serta skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun program dan kegiatan bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang terjadi selama tahun pelaksanaan Renstra.

Dalam pelaksanaannya, pendanaan dalam kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersumber dari alokasi dana APBD, APBN dan PHLN. Secara lebih lengkap program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

## BAB VI

Indikator kinerja OPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 6. 1**

**Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi	a.	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%
b.		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c.		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d.		Persentase rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e.		Persentase tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	
			kinerja OPD						
		f.	Nilai LAKIP OPD (minimal BB)	BB	BB	B	B	AA	AA
		g.	Persentase tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		h.	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		i.	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		j.	Persentase tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	a.	Terfasilitasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b.	Terfasilitasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi	0%	0%	25%	25%	25%	100%

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	
		program Pemerintah Daerah provinsi							
		c. Persentase Rumah Layak Huni		0%	0%	25%	25%	25%	100%
		d. Perkuatan Kelembagaan Bidang Perumahan dan Permukiman		0%	15%	20%	25%	30%	100%
		e. Tersedianya Database perumahan		0%	15%	20%	25%	30%	100%
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	a. Peningkatan cakupan layanan air minum		69%	70%	72%	75%	80%	85%
		b. Peningkatan cakupan layanan air limbah		56%	57%	58%	59%	60%	61%
		c. Peningkatan rumah tangga bersanitasi	71%	72%	73%	74%	75%	76%	77%
		d. Penurunan kawasan kumuh	17,50%	16,50%	15,50%	14,50%	13,50%	12,50%	11,50%
		e. Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi			30,00%	30,01%	30,02%	30,03%	30,04%
4	Tersedianya produk legal	a. Perda Persampahan		0	0	1 Draft	1 Perda	0	1 Perda

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2016	2017	2018	2019	2020		
	formal TPA Sampah Regional	b.	Master Plan Persampahan		0	0	1 Dokumen Masterplan	0	0	1 Dokumen Masterplan
		c.	Dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/ kab/kota penghasil sampah		0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
5	Meningkatnya peran serta masyarakat di kawasan TPA Sampah Regional	a.	Jumlah kelompok masyarakat di kab/kota yang diberikan penyuluhan/ sosialisasi persampahan		0	0	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	16 Nagari
		b.	Jumlah kelompok masyarakat yang dikutsertakan dalam kegiatan usaha pengolahan sampah di TPA Sampah Regional		0	0	5 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	7 Kelompok Masyarakat	26 Kelompok Masyarakat
6	Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional	a.	Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional		20%	40%	60%	80%	100%	100%
7	Berkurangnya daerah genangan pada kawasan permukiman	a.	Panjang Drainase Terbangun		2,5 km	3,2 km	3,9 km	4,6 km	5,3 km	6,0 km

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2016	2017	2018	2019	2020		
8	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang partisipatif, serasi seimbang dan terpadu	a.	tingkat akurasi, kecermatan dan kesesuaian perencanaan dan penetapan penggunaan tanah	0%	0%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
9	Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	a.	ketersediaan informasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	79%	79%	80,50%	82%	83,50%	85%	85%
10	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan penetapan tanah ulayat	a.	persentase masalah tanah yang difasilitasi	80%	80%	85,00%	85%	87,50%	90%	90%

Adapun rencana target program prioritas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 6.2



**Tabel 6. 2**  
**Indikasi Target Capaian Kinerja Program Berdasarkan Program Prioritas**  
**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					T	T	T	T	T	T	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	%				100%	100%	100%	100%	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur	%				100%	100%	100%	100%	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	%				100%	100%	100%	100%	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Terciptanya Peningkatan SDM Aparatur	%				100%	100%	100%	100%	
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja</b>	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan	%				100%	100%	100%	100%	

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					T	T	T	T	T	T	
	dan keuangan										
	Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan	%				100%	100%	100%	100%	
	Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	Unit	2.000,00			500	500	500	500	
		Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Unit	250,00			60	60	60	70	
		Persentase rumah layak huni	%	76,00			80,99	81,75	82,51	83,27	
		Perkuatan kelembagaan bidang perumahan dan permukiman	Paket	1			1	1	1	1	
		Tersedianya database perumahan dan	Dokumen	1			1	1	1	1	

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					T	T	T	T	T	T	
		permukiman									
		Sertifikasi dan registrasi bagiorang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah	%	0			10	20	30	40	
	<b>Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>	Penurunan luasan kawasan kumuh	%	16,5			14,5	13,5	12,5	11,5	
		Meningkatnya kualitas PSU Permukiman	%	30			30,01	30,02	30,03	30,04	
		Jumlah perda yang diterbitkan	Dokumen	0			1 Draft	1 Perda			
		Jumlah dokumen master plan persampahan	Dokumen	0			1 Dokumen Masterplan				
		Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan	Dokumen	0			1	1	1	1	

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					T	T	T	T	T	T	
		Jumlah nagari yang telah diberikan sosialisasi persampahan	Nagari	0			4	4	4	4	
		Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	Kelompok Masyarakat	0			5	6	7	8	
		Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	%	68			71	72	73	74	
		SPAM regional terbangun	kawasan	1			5	0	0	0	
		SPAM IKK ditingkatkan	kawasan	30			9	9	9	15	
		Peningkatan kinerja pelayanan SPAM	%	68			71	72	73	74	
		Persentase jaringan drainase yang dibangun	%	25 km			65	77	88	100	
		Meningkatnya rumah tangga bersanitasi	%	72			74	75	76	77	
	<b>Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan</b>	Terlaksananya operasional TPA	Unit				20	25	30	35	

NO	URUSAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					T	T	T	T	T	T	
		Jumlah infrastruktur TPA Sampah Regional yang dipelihara	Paket	1			1	1	1	1	
		Jumlah lokasi kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	Unit	2			2	3	3	4	
	<b>Pengelolaan Pertanahan</b>	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah	Dokumen	0			1	1	1	1	
		Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	%	79,00			80,50	82,50	83,50	85,00	
		Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanah	%	80,00			85,00	85,00	87,50	90,00	

Rencana strategis ini adalah Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Lima Tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dan target – target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun kedepan.

Dokumen ini mencakup jangka waktu rentang tahun 2016 - 2021 sesuai dengan masa kerja Gubernur dan sesuai juga dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun dan pada saat masa transisi yaitu pada tahun 2017 Dokumen Renstra ini dapat dipergunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja 2017, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat dalam RPJP-Daerah 2010-2025 dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM - Nasional maupun dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, berkurangnya kawasan kumuh, berkurangnya rumah tidak layak huni, meningkatnya cakupan layanan air minum, tersedianya TPA Sampah Regional, keterpaduan antar daerah/wilayah perbatasan Provinsi, menumbuh kembangkan kegiatan pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah serta perluasan akses sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Provinsi Sumatera Barat.

Selain hal tersebut di atas, dokumen ini juga menjadi acuan penanganan pasca gempa 2009 dalam kegiatan rehabilitasi rumah masyarakat serta rehabilitasi/ retrofit/ pembangunan kembali gedung perkantoran pemerintah.

Demikian penyusunan dokumen ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
				1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)	6 (10)
1	Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai LAKIP OPD (minimal BB)	BB	BB	B	B	AA	AA
			Persentase tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	1	1	1	1	1	1
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPIMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Terfasilitasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	0%	0%	25%	25%	25%	100%
			Terfasilitasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	0%	0%	25%	25%	25%	100%
			Persentase Rumah Layak Huni		15%	20%	25%	30%	100%
			Perkuatan Kelembagaan Bidang Perumahan dan Permukiman		15%	20%	25%	30%	100%
			Tersedianya Database perumahan	11%	16%	21%	26%	26%	100%
			Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah	0%	0%	25%	25%	25%	100%
		Meningkatnya penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara	Jumlah bangunan gedung pemerintah						
			Jumlah bangunan strategis terbangun						
			Jumlah rumah negara terbangun						
			Tempat evakuasi sementara (shelter) terbangun						
3	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan	Peningkatan cakupan layanan air minum	69%	70%	72%	75%	80%	85%
			Peningkatan cakupan layanan air limbah	56%	57%	58%	59%	60%	61%
			Peningkatan rumah tangga bersanitasi	63%	64%	65%	66%	67%	68%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Penurunan kawasan kumuh	16.50%	15.50%	14.50%	13.50%	12.50%	11.50%
			Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi		30.00%	30.01%	30.02%	30.03%	30.04%
		Berkurangnya daerah genangan pada kawasan permukiman	Panjang Drainase Terbangun	2,5 km	3,2 km	3,9 km	4,6 km	5,3 km	6,0 km
		Tersedianya produk legal formal TPA Sampah Regional	Perda Persampahan			1 Dokumen draft Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan	1 Dokumen Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan		
			Masterplan Persampahan			1 Dokumen Masterplan Persampahan	-		
			Dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/ kab/kota penghasil sampah			1 Dokumen (1 Kecamatan)	1 Dokumen (1 Kecamatan)	1 Dokumen (1 Kecamatan)	1 Dokumen (1 Kecamatan)
		Meningkatnya peran serta masyarakat di kawasan TPA Sampah Regional	Jumlah kelompok masyarakat di kab/kota yang diberikan penyuluhan/ sosialisasi persampahan			4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari
			Jumlah kelompok masyarakat yang dikutsertakan dalam kegiatan usaha pengolahan sampah di TPA Sampah Regional			5 Kelompok	6 Kelompok	7 Kelompok	8 Kelompok
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi	Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional	Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit
5	Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah	Tersedianya dokumen perencanaan Penggunaan Tanah dan penetapan penatagunaan tanah	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
		Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Meningkatnya Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	79%	80.5%	82%	83.5%	85%	85%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan Penetapan Tanah Ulayat	Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	80%	85%	85%	87.5%	90%	90%



TABEL 5.1.  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				
							2018			2019			2020			2021											
							Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi									
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)										
Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanian	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	1	01	1	01	04	01	01			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1,937</b>		<b>100%</b>	<b>2,228</b>		<b>100%</b>	<b>2,561</b>		<b>100%</b>	<b>2,946</b>		
			1	01	1	01	04	01	01	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	12		100%	14		100%	16		100%	18		
			1	01	1	01	04	01	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana untuk layanan jasa komunikasi (Telpon), Air & Listrik		100%	220		100%	253		100%	291		100%	335		
			1	01	1	01	04	01	01	08		Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	Tersedianya jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor		100%	855		100%	983		100%	1,130		100%	1,300		
			1	01	1	01	04	01	01	10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor		100%	100		100%	115		100%	132		100%	152		
			1	01	1	01	04	01	01	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan/foto copy yang diperlukan		100%	100		100%	115		100%	132		100%	152		
			1	01	1	01	04	01	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	50		100%	58		100%	67		100%	77		
			1	01	1	01	04	01	01	14		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan		100%	25		100%	29		100%	33		100%	38		
			1	01	1	01	04	01	01	17		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke Dalam dan Luar Daerah		100%	500		100%	575		100%	661		100%	760		
		1	01	1	01	04	01	01	18		Penyediaan jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terlaksananya Kegiatan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi		100%	75		100%	86		100%	99		100%	114			
		Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur			1	01	1	01	04	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>2,740</b>		<b>100%</b>	<b>2,301</b>		<b>100%</b>	<b>2,646</b>		<b>100%</b>	<b>3,044</b>	
					1	01	1	01	04	01	02	11		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		100%	610		100%	702		100%	807		100%	928
					1	01	1	01	04	01	02	19		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional		100%	250		100%	288		100%	331		100%	381

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2018			2019			2020			2021		
							Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi
			1 01 1 01 04 01 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100		100%	115		100%	132		100%	152	
			1 01 1 01 04 01 02 43	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi		100%	100		100%	115		100%	132		100%	152	
			1 01 1 01 04 01 02 xx	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional		4 Unit	1.480		2 Unit	851		2 Unit	979		2 Unit	1.126	
			1 01 1 01 04 01 02 xx	Pengadaan Meubelier	Tersedianya Meubelier guna menunjang kelancaran Aktivitas Kantor		20	200		20	230		20	265		20	305	
		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	1 01 1 01 04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	200		100%	230		100%	265		100%	305	
			1 01 1 01 04 01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Karyawan PNS Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		100%	200		100%	230		100%	265		100%	305	
		Persentase rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	1 01 1 01 04 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya Peningkatan SDM Aparatur		100%	200		100%	230		100%	265		100%	305	
			1 01 1 01 04 01 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan		100%	200		100%	230		100%	265		100%	305	
		Persentase tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja dan tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan pada unit kinerja OPD	1 01 1 01 04 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan		100%	400		100%	460		100%	529		100%	609	
			1 01 1 01 04 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD (LAKIP, LKP) dan LPPD)		100%	100		100%	115		100%	132		100%	152	
					Nilai LAKIP OPD (minimal BB)		B			B			AA			AA		
			1 01 1 01 04 01 06 04	Penatausahaan Keuangan OPD	Terlaksananya Kelancaran Penatausahaan Keuangan OPD		100%	300		100%	345		100%	397		100%	457	
		Persentase tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja dan tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan	1 01 1 01 04 01 07	Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan		100%	550		100%	633		100%	729		100%	839	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							2018			2019			2020			2021				
							Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi		
		keuanganpada unit kinerja OPD	1 01 1 01 04 01 07 01	Penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD	Tersusunnya RKA dan DPA OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		100%	200		100%	230		100%	265		100%	305			
			1 01 1 01 04 01 07 02	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Program Tahunan		100%	200		100%	230		100%	265		100%	305			
			1 01 1 01 04 01 07 03	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD	Tersedianya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang OPD, serta tunjuk aset yang telah dihibahkan ke Kabupaten/Kota		100%	150		100%	173		100%	199		100%	229			
			1 01 04 1 01 04 01 10	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>				<b>49,260</b>			<b>51,568</b>		<b>55,730</b>			<b>58,320</b>				
Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Terfasilitasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi			Fasilitas Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi		25%	23,600	Sumatera Barat	25%	25,960	Sumatera Barat	25%	28,556	Sumatera Barat	25%	31,412	Sumatera Barat	
		Terfasilitasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi			Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Yang Terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi		25%	6,960	Sumatera Barat	25%	7,308	Sumatera Barat	25%	7,674	Sumatera Barat	25%	8,058	Sumatera Barat	
		Persentase rumah layak huni			Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi MBR di Kawasan Kumuh	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan		100%	15,000	Sumatera Barat	100%	15,000	Sumatera Barat	100%	16,500	Sumatera Barat	100%	16,500	Sumatera Barat	
		Perkuatan Kelembagaan Bidang Perumahan dan Permukiman			Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Provinsi Sumatera Barat		100%	500		100%	500								
					Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya penyusunan Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat		100%	400		100%	300		100%	300		100%	-		
					Penyusunan NSPK Pengembangan Perumahan	Tersusunnya Norma Standar Pedoman Kriteria Pengembangan Perumahan di Provinsi Sumatera Barat		100%	300					100%	-		100%	400		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode									Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
															2018			2019			2020			2021		
															Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi
											Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan		100%	200		100%	250		100%	275		100%	275		
											Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pembinaan kepada POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat		100%	200		100%	250		100%	275		100%	275		
											Koordinasi dan Fasilitas Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)		100%	200		100%	250		100%	250		100%	250		
											Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam	Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam		100%	400		100%	400		100%	450		100%	450		
											Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat di Sumatera Barat		100%	200		100%	250		100%	250		100%	250		
		Tersedianya Database perumahan									Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat	Tersusun dan terupdatenya Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Sumatera Barat		100%	1,000	5 Lokasi	100%	1,100	5 Lokasi	100%	1,200	5 Lokasi				
		Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah									Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Sumatera Barat		100%	300								100%	450		
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Penurunan kawasan kumuh	1	01	04	1	01	04	01	12	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>				<b>32,590</b>			<b>45,860</b>			<b>46,780</b>			<b>46,300</b>		
											Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	Terlaksananya PLP2K-BK		4 Kawasan	13,800	Dharmasraya, Pessel, Solse, Sijunjung	4 Kawasan	13,800	Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota	4 Kawasan	15,000	Pasbar, Padang, Mentawai, Pessel	4 Kawasan	16,000	Padang, Pariaman, Solok, Kab. Solok	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2018			2019			2020			2021		
							Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi
				Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)		4 Dokumen	2,300	Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota	4 Dokumen	2,300	Pasbar, Padang, Mentawai, Pessel	4 Dokumen	2,500	Padang, Pariaman, Solok, Kab. Solok	4 Dokumen	2,500	Payakumbuh, Agam, Pessel, Padang Pariaman
				Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum pada Kawasan Strategis dan Khusus		3 Kawasan	13,000	Dharmasraya (2 Lok), Padang	6 Kawasan	26,000	Dharmasraya, Sijunjung, Padang, Kota Solok, Pessel, Agam	6 Kawasan	26,000	Padang, Payakumbuh, Agam, Padang Pariaman, Pasbar, Pasaman	6 Kawasan	26,000	Kab. Solok, Dharmasraya, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Pessel
				Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus	Terlaksananya Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum pada Kawasan Strategis dan Khusus		6 Dokumen	3,000	Dharmasraya, Sijunjung, Padang, Kota Solok, Pessel, Agam	6 Dokumen	3,000	Padang, Payakumbuh, Agam, Padang Pariaman, Pasbar, Pasaman	6 Dokumen	3,000	Kab. Solok, Dharmasraya, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Pessel	3 Dokumen	1,500	Mentawai, Padang, Payakumbuh
	Tersedianya produk legal formal TPA Sampah Regional	Perda Persampahan			Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat	Jumlah perda yang diterbitkan	1 Dokumen Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan	250	Sumatera Barat	1 Dokumen Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan	500	Sumatera Barat						
	Meningkatnya peran serta masyarakat di kawasan TPA Sampah Regional	Jumlah Aparatur kab/kota yang diberikan penyuluhan/ sosialisasi persampahan			Sosialisasi persampahan terhadap Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang telah diberikan sosialisasi persampahan	19	240	Sumatera Barat	19	260	Sumatera Barat	19	280	Sumatera Barat	19	300	Sumatera Barat
Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional	Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional	1	01	04	1	01	04	01	11								
				<b>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan</b>				<b>5,900</b>			<b>7,470</b>			<b>8,040</b>			<b>8,610</b>	
				Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional	Terlaksananya operasional TPA		20	4,500	Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kab. Solok	25	6,000	Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kab. Solok	30	6,500	Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kab. Solok	35	7,000	Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kab. Solok
				Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional	Tersedianya infrastruktur di TPA Sampah Regional		2	1,200	Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kab. Solok	2	1,250	Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kab. Solok	2	1,300	Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kab. Solok	2	1,350	Kabupaten Sijunjung
				Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional	Jumlah lokasi kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau		2	200	Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kab. Solok	2	220	Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kab. Solok	2	240	Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kab. Solok	2	260	Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kab. Solok
Mewujudkan catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah	Tersedianya dokumen perencanaan Penggunaan Tanah dan penetapan penatagunaan tanah	1	01	04	1	01	04	01	13								
				Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah		1 Dokumen	225	Jalan Toi, KEK Mandeh, Terowongan Sianok	1 Dokumen	225	3 Lokasi	1 Dokumen	225	3 Lokasi	1 Dokumen	225	3 Lokasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2018			2019			2020			2021		
							Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi	Target	Rp (juta)	Lokasi
				Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		1 Kali Kegiatan	163	Padang	1 Kali Kegiatan	180	Padang	1 Kali Kegiatan	198	Padang	1 Kali Kegiatan	218	Padang
				Bimtek Pengelolaan Pertanahan	Terlaksananya Bimtek Perencanaan Penatagunaan Tanah, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Penanganan Masalah tanah dan Sosialisasi Pengaturan dan Penetapan Tanah Ulayat		4 Kali Kegiatan	570	Padang	4 Kali Kegiatan	634	Padang	4 Kali Kegiatan	697	Padang	4 Kali Kegiatan	744	Padang
Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Meningkatnya persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum			Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	Terlaksananya Penanganan Masalah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Tersedianya data penyelesaian masalah tanah ulayat dan Tersedianya data Penyelesaian masalah Tanah Kosong, Tanah Terlantar, Tanah Kosong, Redistribusi Tanah, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		3 Dokumen	553	19 Kab/Kota	3 Dokumen	614	19 Kab/Kota	3 Dokumen	686	19 Kab/Kota	3 Dokumen	737	19 Kab/Kota
				Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		1 Kali Kegiatan	169	Padang	1 Kali Kegiatan	186	Padang	1 Kali Kegiatan	205	Padang	1 Kali Kegiatan	225	Padang
Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan Penetapan Tanah Ulayat	Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan			Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	Terlaksananya Penanganan Masalah sengketa dan konflik Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat		85%	183	19 Kab/Kota	85%	185	19 Kab/Kota	87.5%	200	19 Kab/Kota	90%	261	19 Kab/Kota
				Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi		1 Dokumen	165	19 Kab/Kota	1 Dokumen	187	19 Kab/Kota	1 Dokumen	200	19 Kab/Kota	1 Dokumen	220	19 Kab/Kota















Tabel. 6.1 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompoten dan berintegritas dan budaya organisasi yang berkinerja tinggi	a. Persentase pelayanan administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		f. Nilai LAKIP OPD (minimal BB)		BB	BB	B	B	AA	AA
		g. Persentase tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		h. Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		i. Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		j. Persentase tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit OPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	a. Terasilitasinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Terasilitasinya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		0%	0%	25%	25%	25%	100%
		c. Persentase Rumah Layak Huni		0%	0%	25%	25%	25%	100%
		d. Perkuatan Kelembagaan Bidang Perumahan dan Permukiman		0%	15%	20%	25%	30%	100%
		e. Tersedianya Database perumahan		0%	15%	20%	25%	30%	100%
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	a. Peningkatan cakupan layanan air minum		69%	70%	72%	75%	80%	85%
		b. Peningkatan cakupan layanan air limbah		56%	57%	58%	59%	60%	61%
		c. Peningkatan rumah tangga bersanitasi	71%	72%	73%	74%	75%	76%	77%
		d. Penurunan kawasan kumuh	17.50%	16.50%	15.50%	14.50%	13.50%	12.50%	11.50%
		e. Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi			30.00%	30.01%	30.02%	30.03%	30.04%
4	Tersedianya produk legal formal TPA Sampah Regional	a. Perda Persampahan		0	0	1 Draft	1 Perda	0	1 Perda
		b. Masterplan Persampahan		0	0	1 Dokumen Masterplan	0	0	1 Dokumen Masterplan
		c. Dokumen kerjasama pengelolaan sampah dengan instansi/ kab/kota penghasil sampah		0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
5	Meningkatnya peran serta masyarakat di kawasan TPA Sampah Regional	a. Jumlah kelompok masyarakat di kab/kota yang diberikan penyuluhan/ sosialisasi persampahan		0	0	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	16 Nagari
		b. Jumlah kelompok masyarakat yang dikutsertakan dalam kegiatan usaha pengolahan sampah di TPA Sampah Regional		0	0	5 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	7 Kelompok Masyarakat	26 Kelompok Masyarakat
6	Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional	a. Meningkatnya infrastruktur TPA Sampah Regional		20%	40%	60%	80%	100%	100%
7	Berkurangnya daerah genangan pada kawasan permukiman	a. Panjang Drainase Terbangun		2,5 km	3,2 km	3,9 km	4,6 km	5,3 km	6,0 km
8	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang partisipatif, serasi seimbang dan terpadu	a. tingkat akurasi, kecermatan dan kesesuaian perencanaan dan penetapan penggunaan tanah	0%	0%	100.00%	100%	100.00%	100%	100%
9	Terwujudnya tertib pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	a. ketersediaan informasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	79%	79%	80.50%	82%	83.50%	85%	85%
10	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian masalah tanah dan penetapan tanah ulayat	a. persentase masalah tanah yang difasilitasi	80%	80%	85.00%	85%	87.50%	90%	90%